

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Tetap Lanjutkan Pembangunan LRT Fase Dua

Gambir, Warta Kota

Menanggapi pemberitaan yang beredar dari sejumlah berita online terkait tersendatnya proyek Light Rail Transit (LRT) karena regulasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan bahwa pemberitaan tersebut kurang tepat.

"Proyek LRT pada saat ini masih dalam proses pengkajian. Pembangunan transportasi massal berbasis rel seperti LRT membutuhkan analisis mendalam," ujar Syafrin dilansir dari PPID DKI Jakarta, pada Kamis (3/11/2022).

Hal tersebut krena menyangkut sejumlah faktor seperti tata guna lahan, proyeksi potensi penumpang di masa mendatang, serta model pendanaan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kendala regulasi terkait pembangunan LRT, sebagaimana diketahui bahwa sesuai rencana lanjutan rute LRT akan dimulai tahun 2020 namun terkendala oleh kapasitas fiskal Jakarta sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Sementara yang dimaksud penyiapan regulasi sejak 2015 merupakan penyiapan regulasi terkait Electronic Road Pricing (ERP).

ERP merupakan salah satu kebijakan dalam mekanisme push and pull strategy dalam transportasi.

Selain penyediaan fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum massal sebagai supply (penyedia) layanan di sektor transportasi (pull strategy), Syafrin menjelaskan bahwa pemerintah juga menerapkan kebijakan yang dapat mengendalikan mobilitas warga dengan kendaraan pribadi melalui push strategy seperti pengendalian tarif parkir, ganjil genap, dan ERP.

Namun, implementasi ERP hingga saat ini masih terkendala peraturan. "Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta sedang dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE) dan sudah memasuki tahap final," ucap Syafrin. Ia berharap melalui Perda PLLSE tersebut dapat menjadi landasan hukum implementasi ERP di Jakarta.

ERP juga diharapkan akan menjadi sebuah solusi mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.

Rapat Terbatas

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur

DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memenuhi undangan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang membahas angkutan massal perkotaan bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Rapat terbatas tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/11/2022).

Menanggapi arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas itu, Heru akan menindaklanjuti dengan melakukan upaya yang mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sesuai arahan Pak Presiden yang mengatakan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang perlu diintensifkan, dan DKI Jakarta dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal perkotaan bagi kota-kota lain di tanah air," ujar Heru dikutip dari PPID DKI Jakarta, pada Kamis (3/11/2022).

Heru mengatakan, pihaknya akan mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, sekaligus merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri. (m36)